

**ANALISIS BELANJA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**

Hendy Fauzi

NPP. 28.0603

*Asdaf Kota Tangerang, Provinsi Banten*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: prajahendyfauzi@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The problems studied include the analysis of regional expenditures in realizing accountability for regional financial management during the Covid-19 pandemic in Tangerang City, Banten Province, where the realization of regional expenditures by the Tangerang City Government has decreased significantly during the Covid-19 pandemic, resulting in a surplus in 2020 of 137,229,198,270 Rupiahs or 30.35%, the resulting surplus is a separate issue in the implementation of regional financial management related to accountability for the implementation of regional financial management, BPK's opinion in the form of WTP for Tangerang City during the Covid-19 pandemic is its own benchmark for management accountability assessment finance in Tangerang City, Banten Province. **Purpose:** The purpose of this study is to find out, understand, and identify so as to obtain an overview of the realization of regional expenditures and the factors that influence the realization of regional expenditures in realizing regional financial management accountability during the Covid-19 pandemic in Tangerang City, Banten Province, as well as the efforts made by the Government. Regions in overcoming obstacles to realizing regional financial management accountability during the Covid-19 pandemic in Tangerang City, Banten Province. **Method:** The method used in this research is a qualitative research method by providing descriptive data. Methods of collecting data by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the analysis of expenditures that have been carried out and the accountability of regional financial management in Tangerang City have shown good results, although there is a decline. **Conclusion:** The realization of regional spending in realizing accountability for regional financial management during the Covid-19 pandemic in Tangerang City, Banten Province went quite well. The obstacles that cause the budget's financial performance is not yet optimal, among others: the lack of precise regional development planning, the poor management of regional finances, and the poor quality of apparatus resources. Efforts made by BPKD in solving problems are by monitoring regularly every month through coordination of development evaluations, regular coordination, and increasing the ability and understanding of the apparatus.

**Keywords :** Financial Accountability, Financial Performance, Regional Financial Management

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan yang diteliti yaitu meliputi analisis belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten dimana realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang mengalami penurunan yang cukup signifikan selama masa pandemi *Covid-19* sehingga menghasilkan surplus pada tahun 2020 sebesar Rp. 137.229.198.270 atau sebesar 30,35%, surplus yang dihasilkan menjadi isu tersendiri dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terkait hal akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Opini BPK berupa WTP bagi Kota Tangerang selama masa pandemi *Covid-19* menjadi tolak ukur sendiri terhadap penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Tangerang Provinsi Banten. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi sehingga memperoleh gambaran tentang realisasi belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kendala-kendala untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan memberikan data secara deskriptif. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil analisis belanja yang telah dilakukan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat penurunan. **Kesimpulan:** Realisasi belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten berjalan cukup baik. Adapun hambatan yang menyebabkan belum optimalnya kinerja keuangan anggaran belanja antara lain: masih kurang tepatnya perencanaan pembangunan daerah, masih kurang baiknya pengelolaan keuangan daerah, dan masih kurang baiknya kualitas sumber daya aparatur. Upaya yang dilakukan BPKD dalam menyelesaikan masalah adalah dengan pemantauan secara berkala setiap bulan melalui koordinasi evaluasi pembangunan, koordinasi secara berkala, dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas Keuangan, Kinerja Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan satu hal penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pola otonomi daerah yang dikembangkan dalam aturan tersebut merupakan bentuk realisasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia secara merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dari desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah tidak berarti serta merta penyerahan kewenangan ataupun kekuasaan melainkan tetap ada pengawasan dan kontrol agar pelaksanaan desentralisasi berada di jalur yang tepat sesuai maksud dari pemberlakuan otonomi daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah memiliki peran penting dan krusial

dalam terselenggaranya pemerintahan daerah, perwujudan kesejahteraan rakyat akan jauh lebih mudah dicapai jika kondisi keuangan daerah tersebut baik. Seluruh prosedur pengelolaan keuangan daerah harus saling terintegrasi guna mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk penilaian ataupun sebagai bentuk evaluasi dari segala penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan yang jauh lebih rinci dalam melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, LRA, dan laporan arus kas.

Kota Tangerang menjadi salah satu kota yang menjalankan pengelolaan keuangan daerah selama masa pandemi. Oleh karena itu, kinerja keuangan belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang menjadi indikasi tingkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang. Bukti atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang dapat dilihat pada opini yang diberikan BPK. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari anggaran belanja yang dianggarkan dengan yang direalisasikan. Semakin tinggi realisasi anggaran belanja mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan kemampuan daerahnya atau pendapatan daerahnya sehingga hal tersebut dapat dilihat dari belanja daerah yang dianggarkan dan yang direalisasikan di Kota Tangerang.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kota Tangerang menjadi salah satu kota yang menjalankan pengelolaan keuangan daerah selama masa pandemi. Oleh karena itu, kinerja keuangan belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang menjadi indikasi tingkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang. Bukti atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang dapat dilihat pada opini yang diberikan BPK. Pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang dalam penilaian wajar tanpa pengecualian yang artinya laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang dalam kategori yang baik. Selain itu penilaian terhadap AKIP Kota Tangerang dari tahun 2019 yaitu memperoleh predikat B sedangkan pada tahun 2020 memperoleh predikat BB yang artinya mengalami peningkatan. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik akan penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari anggaran belanja yang dianggarkan dengan yang direalisasikan. Semakin tinggi realisasi anggaran belanja mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan kemampuan daerahnya atau pendapatan daerahnya sehingga hal tersebut dapat dilihat dari belanja daerah yang dianggarkan dan yang direalisasikan di Kota Tangerang. Menurut berita yang diterbitkan oleh situs [www.tangerangnews.com](http://www.tangerangnews.com) yang diakses pada Rabu, 29 September 2021, 21.20 WIB, Walikota Tangerang mengungkapkan terkait realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang pada tahun 2020 selama masa pandemi Covid-19 sebesar Rp 3,64 triliun atau 101,09% sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3,5 triliun atau 86,46% dengan surplus anggaran sebesar Rp 137,22 miliar pada tahun anggaran 2020. Walikota Tangerang berpendapat bahwa surplus tersebut menjadi evaluasi Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Tangerang terlebih hal tersebut terjadi pada masa pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam merealisasikan belanja daerah dengan surplus yang cukup tinggi mengindikasikan keuangan daerah dalam keadaan yang tidak sehat.

realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah Pemerintah Kota Tangerang mengalami penurunan di tahun 2020. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Tangerang selama pandemi dalam keadaan yang sehat yaitu di tahun 2020 berbeda hal dengan tahun 2019. Pencapaian

realisasi belanja daerah Kota Tangerang di tahun 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan yang dianggarkan bahkan tidak berhasil menyentuh angka 90% realisasinya, dan hanya mampu pada kisaran 86%. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan anggaran belanja daerah dalam keadaan yang kurang baik atau kurang sehat, penilaian tersebut atas dasar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diindikasikan dengan realisasi belanja daerah yang baik untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

surplus terjadi di Tahun 2020 sebesar Rp. 137.229.198.270 (30,35%) pada masa pandemi *Covid-19* dan defisit terjadi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 93.425.411.187 (-17,12%). Surplus tersebut menunjukkan kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah belum berhasil merealisasikan pelaksanaan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan surplus pada anggaran. Sedangkan defisit menunjukkan adanya ketidakserasian antara realisasi pendapatan yang diterima dengan realisasi belanja yang dilaksanakan. Pemerintah Kota Tangerang di tahun 2019 mengalami defisit dikarenakan kemampuan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan belanjanya. Pemerintah Kota Tangerang belum mampu merealisasikan belanja daerah dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Dewi Sartika (2018) berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara, menemukan bahwasannya Analisis pertumbuhan belanja menunjukkan hasil kinerja yang cukup baik, dengan adanya pertumbuhan anggaran belanja pada 2014-2016 rata-rata sebesar 2,35%. Hasil analisis Varians Belanja menunjukkan adanya penghematan, karena varians tahun 2014 mencapai 90,00%, varians tahun 2015 sebesar 87,95% serta varians di tahun 2016 mencapai 92,53%. Prioritas belanja Bappeda lebih memprioritaskan belanja operasi sebesar 96,25% bila dibandingkan dengan belanja modal yang hanya 3,74%. Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Sefira Dwi Wulandari (2018) yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014-2016, penelitian ini menjelaskan bahwasannya perlu dilakukan Pengukuran dengan perspektif keuangan terhadap kinerja anggaran masuk kategori efektif karena mampu meningkatkan sumber PAD, dan dikatakan efisien. Dengan detail tahun 2014 mencapai 93,49 %, tahun 2015 sebesar 90,42% dan 2016 sebesar 94,22% dan anggaran belanja yang diserap maupun digunakan sesuai dengan target. Hasil pengukuran kinerja non-keuangan masuk kategori baik karena selalu mengalami peningkatan.

Penelitian berikutnya yaitu dari Sakina Nusafira Tantri dan Putri Irmawati (2018) yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016, yang berkesimpulan bahwasannya Analisis Varians pada anggaran belanja Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta cukup baik. Realisasi anggaran lebih rendah dari anggaran yang disediakan. Analisis pertumbuhan anggaran belanja dari tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan hasil yang fluktuatif disebabkan adanya program yang tidak terlaksana. Analisis keserasian terhadap anggaran belanja menunjukkan keharmonisan anggaran. Ditunjukkan dengan belanja langsung dan modal yang lebih rendah dari belanja operasi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Wirawan Suhaedi (2019) yang berjudul Analisis Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018 yang menyatakan bahwasannya Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dengan nilai Rata-rata sebesar 79,48% sedangkan belanja modal sebesar 20,02%. Pengelolaan anggaran masih kurang efisien dengan rata-rata Rasio efisiensi belanja sebesar 93,30%.

Penelitian terakhir yaitu dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah menunjukkan bahwasannya akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Sumatera Utara.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus penelitian, lokus penelitian, konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menggunakan time series pada masa fenomena pandemi *Covid-19*. Penulis mengambil judul Analisis Belanja Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Provinsi Banten yang kemudian akan dibahas menggunakan teori Mahmudi (2021: 154) mengenai analisis rasio belanja daerah menggunakan 4 rasio: Rasio Varian Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja. Hal itu akan dibahas untuk memperoleh gambaran penilaian atas pelaksanaan realisasi belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang dengan metode kualitatif deskriptif.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi sehingga memperoleh gambaran tentang realisasi belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kendala-kendala untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan analisis realisasi belanja.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 informan yang terdiri dari Kepala BPKD Kota Tangerang, Sekretaris BPKD Kota Tangerang, 2 Kepala Bidang BPKD Kota Tangerang, 6 Kepala Sub Bidang BPKD Kota Tangerang, dan 6 Staf BPKD Kota Tangerang.

## **III. HASIL DAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan untuk melihat bagaimana strategi pemerintah Kota Tangerang dalam pelaksanaan realisasi belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* maka peneliti melakukan analisis data berdasarkan teori analisis belanja daerah diantaranya adalah:

### **3.1 Analisis Belanja Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Provinsi Banten**

Kinerja Belanja Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertugas dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai

dasar penilaian kinerja keuangannya. Menurut Mahmudi (2021: 154), analisis belanja daerah dapat dilakukan dengan beberapa analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Varian Belanja
2. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Rasio Keserasian Belanja
4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Akuntabilitas dapat dipahami bahwasannya akuntabilitas menitikberatkan kepada bentuk pertanggungjawaban berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut harus mampu diwujudkan dari program-program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Hal di atas berlaku juga dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut indikator penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah:

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
  - a. Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran
  - b. Adanya pertanggungjawaban tertulis
2. Output dan outcome yang terukur
  - a. Program yang dicapai
  - b. Adanya akses informasi yang jelas

### 3.1.1 Analisis Belanja Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Provinsi Banten

#### A. Analisis Rasio Varian Belanja

Rumus Analisis Varians Belanja

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Selisih disukai (favourable variance), dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya.
2. Selisih tidak disukai (unfavourable variance), dalam hal realisasi belanja lebih besar dari anggarannya.

**Tabel 3.1**  
**Rasio Varian Belanja Kota Tangerang Tahun 2019-2020**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rupiah)	Realisasi Belanja Daerah (Rupiah)	Varian Belanja	Penilaian
2019	5.037.584.588.109	4.368.716.816.016	- 668.867.772.093	Favorable Variance
2020	4.058.746.417.063	3.508.696.005.532	- 550.050.411.531	Favorable Variance

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, varian belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang dari tahun 2019 sampai dengan 2020 menunjukkan penilaian ataupun klasifikasi varian belanja favorable variance. Favorable variance ini menunjukkan bahwasannya realisasi belanja daerahnya lebih kecil atau tidak lebih besar dari anggaran belanja daerahnya. Penilaian yang disukai ini menunjukkan bahwasannya pemerintah mampu untuk mengontrol dan mengendalikan serta melakukan penghematan atas belanja daerah yang telah di anggarkan.

## B. Analisis Pertumbuhan Belanja

Rumus Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja } Thn_{t-1} \\ &= \frac{\text{Rea. Belanja } Thn_t - \text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.2**  
**Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2019-2020**

Realisasi Belanja Daerah 2019 (Rupiah)	Realisasi Belanja Daerah 2020 (Rupiah)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
4.368.716.816.016	3.508.696.005.532	-860.020.810.484	-19,69%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Rasio pertumbuhan belanja daerah menunjukkan angka penurunan dari tahun 2019-2020 yaitu sebesar 19,69%. Tahun 2019 realisasi terendah yaitu belanja modal sebesar 71,31%, belanja operasional 91,64% dan belanja tak terduga 96,85%. Tahun 2020 realisasi terendah yaitu belanja tak terduga sebesar 47,71%, belanja modal 56,59% dan belanja operasional 92,76%. Penurunan yang cukup besar terjadi di tahun 2020 dikarenakan terdapat beberapa anggaran yang tidak sepenuhnya direalisasikan. Selain itu, realisasi belanja terendah di tahun 2019 terjadi pada pos belanja modal sedangkan tahun 2020 terjadi pada belanja tak terduga. Penurunan yang cukup drastis pada pos belanja modal dan belanja tak terduga mengakibatkan rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan.

## C. Analisis Keserasian Belanja

Analisis Rasio Keserasian Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3.3**  
**Rasio Keserasian Belanja Kota Tangerang Tahun 2019-2020**

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja	
				Operasi	Modal
2019	3.429.688.543.026	880.363.219.623	4.368.716.816.016	78,51%	20,15%
2020	3.147.357.742.439,88	278.145.148.771,90	3.508.696.005.532	89,701%	7,92%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja diatas rasio belanja operasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Tangerang tahun 2019 dan 2020 sebesar 78,51% dan 89,701%. Hal di atas menunjukkan sebagian besar anggaran belanja digunakan untuk belanja operasi terutama untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. Realisasi pengeluaran tahun 2019 pada belanja operasi sebesar Rp. 3.429.688.543.026,00 atau sebesar persentasenya yaitu 91,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.742.466.232.273,46 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 312.777.689.247,46 atau sebesar 8,36%. Apabila dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos belanja operasi tahun 2018 sebesar Rp. 3.261.827.634.218,91 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 167.860.908.807,09 yaitu sebesar 4,89%. Realisasi pengeluaran tahun 2020 untuk belanja operasi sebesar Rp. 3.147.357.742.439,88 (92,76%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.392.851.496.330,36 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 245.493.753.890,48 atau sebesar 7,80%. Jika dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp. 3.429.688.543.026,00 maka terjadi penurunan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 282.330.800.586,12 atau penurunan sebesar 8,23%.

#### D. Analisis Efisiensi Belanja

Rumus Analisis Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3.4**  
**Rasio Efisiensi Belanja Kota Tangerang Tahun 2019-2020**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rupiah)	Realisasi Belanja Daerah (Rupiah)	Rasio Efisiensi	Penilaian
2019	5.037.584.588.109	4.368.716.816.016	86,72%	Cukup Efisien
2020	4.058.746.417.063	3.508.696.005.532	86,45%	Cukup Efisien

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya rasio efisiensi belanja daerah tahun 2019 sebesar 86,72% dan tahun 2020 sebesar 86,45%. Rasio efisiensi belanja daerah tahun 2019 dan 2020 berada dalam kriteria penilaian cukup efisien. Besaran nilai rasio efisiensi belanja Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan pemerintah daerah berhasil melakukan penghematan dengan terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp. 668.867.772.093,08 atau sebesar 13,28% pada tahun 2019 dan masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp. 550.050.411.531 atau sebesar 13,54%.

### 3.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Provinsi Banten

Pengelolaan keuangan daerah diperuntukkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya serta menjamin kesejahteraan masyarakat, dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Kesesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan serta output dan outcome yang terukur.



A. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

1. Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran

Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2019-2020 selalu mengupayakan yang terbaik dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah baik itu dalam hal penerimaan pendapatan maupun pelaksanaan kewajiban berupa belanja daerah. Kota Tangerang secara umum mampu melaksanakan penerimaan pendapatan daerah yang baik dengan kemampuan keuangan yang baik begitupun pada masa pandemi *Covid-19*, namun hal tersebut tidak sejalan dengan pelaksanaan belanja daerah. Ketidaksesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran belanja daerah dapat dibuktikan dari anggaran belanja daerah pada tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 5.037.584.588.109,00, dan Rp. 4.058.746.417.063,00, dengan realisasi Rp. 4.368.716.816.016,00, dan Rp. 3.508.696.005.532,00, tentu menunjukkan perbandingan yang cukup timpang. Ketidaksesuaian realisasi anggaran belanja daerah tersebut juga diakibatkan dikarenakan adanya ketidakberhasilan atas realisasi anggaran pada pos belanja operasional dan belanja modal. Realisasi belanja operasional pada tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 3.429.688.543.026,00, dan Rp. 3.147.357.742.439,88. Realisasi belanja modal pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar Rp. 880.363.219.623,00, dan Rp. 278.145.148.771,90.

2. Adanya pertanggungjawaban tertulis

Pemerintah Kota Tangerang menjamin segala bentuk pertanggungjawaban baik berupa laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal di atas menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan informasi berupa pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Tangerang aktif dalam memberikan informasi keuangan melalui situs resmi Kota Tangerang. Laporan pertanggungjawaban tertulis yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang mampu memperoleh opini WTP dari BPK RI. Selain hal di atas, Pemerintah Kota Tangerang juga aktif memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum melalui situs resmi Kota Tangerang yang berupa website maupun akun social media yang dikelola oleh humas Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

B. *Output* dan *Outcome* yang Terukur

1. Program yang dicapai

Pemerintah Kota Tangerang gencar melakukan pembangunan daerah mulai dari bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan lainnya. Hal di atas menjadi acuan bahwasannya banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang atas dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mensejahterakan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2019, alokasi belanja daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.252.250.989.036,48 atau sebesar 24,84% dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 251 program dengan 2.339 kegiatan. Sedangkan tahun 2020 alokasi belanja daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.001.992.045.748,62,00 atau sebesar 24,76% dari total anggaran belanja daerah yang digunakan dalam mendanai pelaksanaan 135 program dengan 958 kegiatan.

2. Adanya akses informasi yang jelas

Informasi yang jelas akan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tangerang mampu dilakukan dengan memanfaatkan segala media yang ada saat ini. Pemerintah Kota Tangerang menjamin segala bentuk pertanggungjawaban baik berupa laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperbaharui dalam platform yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang memberikan

informasi yang jelas berupa pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Tangerang aktif dalam memberikan informasi keuangan melalui situs resmi Kota Tangerang di antaranya PPID Kota Tangerang dan akun instagram resmi humas Pemerintah Kota Tangerang.

**Tabel 3.5**  
**Hasil Pembahasan**

No.	Uraian	Pembahasan	
1.	Analisis Belanja Daerah	a. Rasio Varian Belanja b. Rasio Pertumbuhan Belanja c. Rasio Keserasian Belanja d. Rasio Efisiensi Belanja	a. Cukup Baik b. Belum Baik c. Cukup Baik d. Cukup Baik
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan b. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> yang Terukur	a. Cukup Baik b. Cukup Baik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

### 3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten

#### A. Faktor Penghambat Realisasi Belanja Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten

##### 1. Masih Kurang Tepatnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada pelaksanaan keuangan daerah yang menjadi hal penting yaitu pada perencanaan pembangunan daerah. Keuangan daerah pada dasarnya hanya sebuah alat dalam menjalankan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah di tentukan. Sering kali ketidakberhasilan pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang yaitu berada pada masih kurang tepatnya perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan kalimat di atas dapat dipahami bahwasannya perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah terlebih dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mengingat bahwasannya keuangan hanyalah menjadi sebuah alat. Tidak lain juga karena jika gagal dalam menyusun rencana sama saja merencanakan kegagalan.

##### 2. Masih Kurang Baiknya Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Tangerang khususnya BKPD Kota Tangerang selalu menjalankan segala bentuk tugas sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Segala tugas yang dilaksanakan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Begitupun pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan kalimat di atas sudah seharusnya pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang berjalan optimal, namun beda halnya ternyata jika hanya terpaku pada dasar hukum ataupun semata hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada maka belum optimalnya kualitas dari pengelolaan keuangan daerah. Salah satu contohnya yaitu pada pelaksanaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang sudah terintegrasi oleh Kementrian Dalam Negeri belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang mengingat bahwasannya Pemerintah Kota Tangerang memiliki aplikasi sendiri dan sudah berjalan terlebih dahulu sebelum diberlakukannya SIPD. Hal di atas menunjukkan ketidakmampuan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

### 3. Masih Kurang Baiknya Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur di Kota Tangerang khususnya di BPKD Kota Tangerang sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan baik secara kuantitas maupun kualitas. Seiring berkembangnya zaman serta diimbangi dengan kemajuan IPTEK, Pemerintah Daerah Kota Tangerang juga patut mengikuti perkembangan yang ada. Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota Tangerang selalu berupaya mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena alasan di atas, kualitas sumber daya aparatur masih belum optimal mengingat masih banyak yang belum mampu mengikuti kemajuan IPTEK yang ada. Sumber daya aparatur yang masih didominasi oleh kalangan 40 tahun ke atas dan lemah atas pelaksanaan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena kalimat di atas, masih banyak ditemukan kinerja yang belum maksimal mengingat sudah lumrahnya digitalisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. Faktor Pendukung Realisasi Belanja Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Provinsi Banten**

### 1. Stabilitasnya Kondisi Ekonomi Makro

Stabilitasnya kondisi ekonomi makro di Kota Tangerang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja keuangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, berimplikasi terhadap pendapatan daerah khususnya pada pos pendapatan asli daerah. Kemampuan serta kemandirian keuangan Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di atas, PAD menjadi prosentase tertinggi pada tahun 2020 meskipun dalam keadaan pandemi. Hal tersebut menunjukkan kondisi ekonomi makro yang stabil dan menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang baik.

### 2. Sarana Prasarana Memadai

Kelengkapan sarana dan prasarana di Kota Tangerang menjadi salah satu faktor pendukung. Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah berjalan dan Pemerintah Kota Tangerang telah mampu memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan guna menunjang hal tersebut. Kemajuan IPTEK mendukung pelaksanaan pemerintahan secara elektronik/online juga mampu meningkatkan transparansi yang akan berimplikasi pada kinerja keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Tangerang telah menjalankan pemerintahan berbasis IPTEK terkhusus di BPKD Kota Tangerang. Pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan sistem keuangan daerah ditunjang dengan segala teknologi yang ada di lingkup pemerintahan di BPKD. Hal ini mendukung tercapainya kinerja keuangan yang baik di era digitalisasi ini.

### 3. Etos Kerja Pegawai Tinggi

Pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung segala kinerja sangatlah dibutuhkan. Begitupun terkait etos kerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam segala pencapaian kinerja. Etos kerja yang dimiliki oleh segenap Pemerintah Kota Tangerang terkhusus Pegawai BPKD sangatlah baik. Pegawai berorientasi kinerja dengan tetap mengutamakan dasar hukum atas segala pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal di atas dapat dipahami bahwasannya penting suatu etos kerja dalam mendukung kinerja terlebih kinerja keuangan mudah akan tindak korupsi dan lain sebagainya. Dengan begitu, etos kerja yang tinggi di kalangan pegawai Pemerintah Kota Tangerang terkhusus di BPKD mengutamakan orientasi kinerja berdasarkan aturan yang mengatur.

## **3.3 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kendala-Kendala Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Provinsi Banten**

1. Pemantauan Secara Berkala Setiap Bulan Melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang melakukan pemantauan yang dikerahkan secara berkala setiap bulan. Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan melalui rapat koordinasi pengendalian evaluasi RKPD Triwulanan yang dilaksanakan Bappeda dengan mengundang seluruh OPD. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan data progress pencapaian sasaran dan program untuk dibahas dan menjadi bahan pengambilan kebijakan baik dilingkup perencanaan maupun penganggaran. Progress pencapaian indikator setiap triwulan juga dibahas pada koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing bidang pemegang urusan. Hasil evaluasi secara berkala juga menjadi dasar untuk penajaman pada proses perencanaan dan penganggaran.

2. Koordinasi Secara Berkala

Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait. Koordinasi tersebut melibatkan tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang terkait pada organisasi perangkat daerah yang diperuntukkan sebagai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan operasional indikator. Koordinasi di atas guna meningkatkan pemahaman organisasi perangkat daerah terkait indikator kinerja sesuai tanggungjawabnya serta memastikan validitas data yang disampaikan organisasi perangkat daerah. Tidak hanya itu, dilakukan juga koordinasi dengan instansi vertikal. Koordinasi dilakukan secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data prediksi dan proyeksi indikator. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara horizontal yaitu di lingkup Pemerintah Daerah Kota Tangerang saja melainkan juga secara vertical dengan pihak dari luar Pemerintahan Daerah Kota Tangerang guna mampu meningkatkan kinerja keuangan.

3. Meningkatkan Kemampuan dan Pemahaman Aparatur

Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terkait tugas dan fungsi perencanaan khususnya dalam menyiapkan konsep rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen rencana kerja serta berdasarkan tupoksi OPD agar selaras dengan visi-misi-tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023. Kemampuan aparatur dapat dilakukan dengan adanya pelatihan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang guna meningkatkan kemampuan dan juga pemahaman aparatur terlebih terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwasannya suatu perencanaan yang baik memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terlebih perencanaan merupakan suatu awalan yang memulai seluruh rangkaian pengelolaan keuangan daerah, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika (2018) yang mengatakan perencanaan mempengaruhi realisasi belanja suatu daerah. Selain itu, realisasi belanja daerah merupakan suatu kewajiban daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memungkinkan terjadinya kesalahan penggunaan wewenang dalam pemerintahan, hal di atas sesuai dengan hasil penelitian Safira Dwi Wulandari (2018) yang menyatakan bahwasannya belanja daerah merupakan hal yang rentan terjadinya kesalahan penggunaan wewenang. Sumber daya manusia memiliki peran tersendiri dalam keberhasilan realisasi pengelolaan keuangan daerah khususnya realisasi belanja daerah, Sakina Nusafira

Tantri dan Putri Imawati (2018) menyatakan hal yang sama perihal sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten berjalan cukup baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten sebagai berikut:  
Faktor Penghambat:
  - a. Masih kurang tepatnya perencanaan pembangunan daerah
  - b. Masih kurang baiknya pengelolaan keuangan daerah
  - c. Masih kurang baiknya sumber daya aparaturFaktor Pendukung:
  - a. Stabilitasnya Kondisi Ekonomi Makro
  - b. Sarana Prasarana Memadai
  - c. Etos Kerja Pegawai
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kendala-kendala untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Provinsi Banten sebagai berikut:
  - a. Pemantauan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi evaluasi pembangunan
  - b. Koordinasi secara berkala
  - c. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki keterbatasan utama yakni dalam waktu, pengetahuan, dan biaya penelitian. Penelitian yang dilakukan juga belum dilakukan secara mendalam terkait data pendukung lainnya yang mampu memberikan ataupun menghasilkan penelitian yang lebih baik.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan investasi daerah sebagai program pemulihan ekonomi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang beserta seluruh jajaran dan pegawai yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan dan arahan untuk pelaksanaan penelitian serta menyukseskan pelaksanaan penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. Nur. 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi. Jakarta: Kencana A.
- Amin, Fadillah. 2019. Penganggaran Di Pemerintah Daerah. Malang: UB Press.
- Lalolo, Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Surakarta: Pustaka Cakra.
- LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga. Administrasi Negara

- Mahmudi. 2021. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moenek, Reydonnyzar. 2020. Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patarai, M. Idris. 2017. Kinerja Keuangan Daerah. Makasar: De La Macca.
- Prasetya, Gege Edy. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Saleh, Choirul. 2020. Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sinurat, Marja. 2017. Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Solihin, Dadang. 2007. Penerapan Good Governance di sektor public untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik. Bandung: Alfabeta.

